

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

1. Pengembangan Inflasi Daerah atau Pengembangan Harga Barang Kebutuhan Pokok Penting Barang Lainnya dan Jasa serta Risiko Kedepan.

**Terkhusus di Kabupaten Empat Lawang, harga komoditi yang mengalami kenaikan secara signifikan adalah Beras seharga Rp.16.500/Kg, Jagung pakan seharga Rp.8.000/Kg, Cabai Keriting seharga Rp.100.000/Kg, Cabai Rawit Rp.60.000/Kg, Bawang Merah seharga Rp.60.000/Kg, serta Bawang Putih seharga Rp.60.000/Kg**

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

1. Identifikasi Permasalahan Pengendalian Inflasi di Daerah.

**Secara umum, Inflasi yang terjadi di Kabupaten Empat Lawang terkhusus untuk Komoditi pertanian adalah karena supply atau persediaan komoditi pertanian yang berkurang dikarenakan cuaca dan iklim yang cenderung hujan secara terus menerus sehingga mengganggu perkembangan dari komoditi tersebut dan mengakibatkan harganya meningkat.**

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Pelaksanaan Kebijakan TPID di Daerah.

**Adapun kebijakan yang bisa dilaksanakan adalah :**

1. **Pelaksanaan GSMP (Gerakan Sumsel Mandiri Pangan) dengan cara tanam serentak, panen serentak, dsb.**
2. **Pendistribusian bantuan saprodi pertanian yang baik dan tepat sasaran.**
3. **Gerakan Panen Raya di daerah agar memotivasi petani untuk bercocok tanam dengan lebih baik.**

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Evaluasi Kebijakan TPID di daerah.

**Secara umum, pengendalian inflasi di Kabupaten Empat Lawang berjalan dengan cukup baik karena Kabupaten Empat Lawang sendiri mengalami inflasi yang tidak terlalu buruk karena harga komoditi pertanian yang ada di Kabupaten Empat Lawang tidak terlalu tinggi.**

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Rekomendasi kebijakan TPID di daerah.

**Koordinasi dan Sinergi antara OPD di Kabupaten Empat Lawang lebih ditingkatkan lagi serta *jobdesk* dari masing-masing OPD harus jelas agar tidak terjadi miskomunikasi dan salah pemahaman pada pelaksanaan program TPID di daerah.**